



Pengungkapan Low Carbon Economy di tinjau dari kepemilikan saham dan Biaya Lingkungan

Sisilia Lidia Ayemi^{1*}, Yusron Dfinubun², Vebby Anwar³

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Muhammdiyah Sorong

³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Muhammdiyah Sorong

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. (2) Untuk menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Variabel penelitian ini terdiri atas variabel independen, dan dependen, yakni Kepemilikan Saham Publik terhadap variabel Pengungkapan *Low Carbon Economy*, variabel Biaya Lingkungan terhadap variabel Pengungkapan *Low Carbon Economy*. Sampel data penelitian ini adalah 42 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*). Penelitian ini menggunakan teknik *Judgement Sampling* dan metode analisis PLS (*Partial Least Square*), data diolah menggunakan Software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. Biaya Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*.

Kata kunci: Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, Akuntansi Hijau, *Low Carbon Economy*.

*Corresponding Author: sisiliay2@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepemilikan saham publik merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat luas. Saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh perusahaan kepada para investor (Dhayal et al., 2024) (Alifi & Kurniawati, 2024). Investor biasanya mempertimbangkan analisis laporan keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli saham (Tracy, 2024). Laporan perusahaan yang jelas, lengkap, dan informatif mengenai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dapat memberikan indikasi positif kepada publik (Dagestani et al., 2024); (Sujatmiko et al., 2024). Kepemilikan saham tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki berbagai hak dan kewajiban (MacLeod, 2024). Investor publik memiliki kewajiban berdasarkan perannya dalam perusahaan, dan seharusnya berhak mendapatkan akses informasi tentang kinerja perusahaan (Vazhynskyi et al., 2024).

Hubungan antara kepemilikan saham publik dan pengungkapan ekonomi rendah karbon dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (Ali et al., 2024). Berdasarkan pandangan teori stakeholder, tanggung jawab perusahaan meliputi tidak hanya pemegang saham, tetapi juga semua pihak yang terhubung atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Talan et al., 2024). Dengan meningkatnya tuntutan dari pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas, perusahaan diwajibkan untuk memasukkan aspek lingkungan dalam strategi bisnis mereka dan menyampaikan informasi yang relevan kepada publik (Reid et al., 2024). Perubahan ini menekankan pergeseran peran pemangku kepentingan dalam memengaruhi tindakan perusahaan serta mendorong tercapainya hasil sosial yang lebih positif (Alshukri et al., 2024).

Biaya lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *low carbon economy*. Biaya lingkungan adalah pengeluaran yang perlu dikeluarkan perusahaan akibat dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasionalnya, serta untuk mendukung upaya-upaya perlindungan lingkungan yang direncanakan (Uswatul et al., 2024). Pernyataan yang sejalan juga diungkapkan (Dhayal et al., 2024), Biaya lingkungan merujuk pada pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai program-program perbaikan lingkungan sebagai konsekuensi dari pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Biaya lingkungan sebaiknya disajikan secara terpisah sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis beban yang ditanggung (Difinubun & Fatimah, 2023). Langkah ini diambil untuk memungkinkan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara lebih optimal, khususnya yang berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan (Abid et al., 2024).

Keterkaitan antara biaya lingkungan dan ekonomi rendah karbon dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yakni teori *stakeholder* dan teori legitimasi (Meutia et al., 2022). Menurut teori stakeholder, perusahaan berkewajiban tidak hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pradhani et al., 2024). Dengan meningkatnya tuntutan dari para pemangku kepentingan akan transparansi dan akuntabilitas, perusahaan diharuskan mengungkapkan biaya lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dalam menjalankan strategi

bisnisnya, sekaligus menyampaikan informasi yang relevan kepada publik (Saeed et al., 2024). Berdasarkan teori legitimasi, sebuah organisasi atau perusahaan perlu memenuhi syarat tertentu agar dapat berkembang dan tetap bertahan, aktivitas yang dijalankan perlu disesuaikan dengan norma, nilai, serta harapan sosial yang berlaku di masyarakat (Al Sayed & Sayed, 2024). Kesesuaian aktivitas perusahaan dengan norma sosial tercermin melalui alokasi proporsi biaya yang seimbang antara kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan non lingkungan (Ren, 2024). Untuk mengurangi kesenjangan legitimasi, perusahaan perlu mengungkapkan data mengenai emisi karbon serta dampak lingkungan yang ditimbulkan (Cai et al., 2024). Melalui transparansi dan akuntabilitas dalam hal ekonomi rendah karbon serta pengelolaan biaya lingkungan (Difinubun & Nastiti, 2024), Perusahaan dapat menegaskan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan dan memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan (Can & Turker, 2024).

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini didasarkan pada teori *stakeholder*, yang merupakan isu strategis yang membahas cara perusahaan dalam mengelola hubungan dengan para pihak yang berkepentingan terhadap operasionalnya (Freeman et al., 2020). Secara umum, pemangku kepentingan dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, karena mereka dapat memengaruhi maupun terpengaruh oleh aktivitas perusahaan (Qian et al., 2024). Dari sisi internal, pemangku kepentingan utama mencakup karyawan, investor, pemberi kredit, konsumen, serta pemasok (Lindsey et al., 2021). Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi serta kebutuhan para *stakeholders* (Barney & Harrison, 2020). Perusahaan berusaha memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan, mengingat peran penting dukungan *stakeholders* bagi keberlangsungan perusahaan (Freeman et al., 2021). Dukungan dari pemangku kepentingan dapat diperoleh melalui penerapan pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan, dimana para pemangku kepentingan mengharapkan manajemen memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan (Kujala et al., 2017).

Menurut (Mulpiani, 2019), pemangku kepentingan atau *stakeholder* merupakan individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan memberikan pengaruh terhadap perusahaan, sehingga perusahaan perlu menjalin kerja sama dengan seluruh pihak terkait pada kegiatan operasional usahanya guna menjamin kelangsungan dan kesinambungan kegiatan usahanya (Ghazali, A., n.d.). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nanik Ermawati dan Yanuar Nugroho, n.d.), Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya (Husada & Handayani, 2021); (Lamberton, 2015); dan (Handayani, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono dalam penelitian (Damayanti, 2024), penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada positivisme, yang digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menjelaskan serta menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ini memfokuskan pada populasi yang terdiri dari 3.200 perusahaan di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta program PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*) dan telah menyampaikan laporan tahunan secara konsisten pada rentang waktu 2019 hingga 2023. Sampel adalah sekumpulan unit yang dipilih dari populasi dengan tujuan merepresentasikan karakteristik dan proporsi yang ada dalam populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *judgment sampling* menurut (Wijaya, 2018), *judgment sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2017), n.d.).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kearsipan. Menurut (Sugiarto, 2018) teknik kearsipan merupakan suatu proses penataan dan penyimpanan dokumen atau berkas secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Data yang di analisis merupakan data sekunder bersumber dari PROPER atau situs web resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data ini diambil dari *annual report* yang telah dirilis oleh perusahaan sepanjang periode penelitian (Ghazali, A., n.d.). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), dan pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Analisis Uji Deskriptif

Hasil statistik deskriptif berdasarkan nilai Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, dan *Low Carbon Economy*.

Tabel 10. Hasil Statistik Deskriptif

Indikator	<i>n</i>	Mean	Median	Observed min	Observed max	Standard deviation
X1	210	0.490	0.430	0.010	1.000	0.311
X2	210	0.136	0.030	0.000	1.900	0.284
Y1.1	210	0.644	0.630	0.610	0.950	0.065
Y1.2	210	0.660	0.640	0.610	0.900	0.057
Y1.3	210	0.657	0.640	0.610	0.960	0.065

Sumber: Data Diolah, *Output* SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hasil deskriptif untuk variabel independen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan terkait

Kepemilikan Saham Publik tergolong baik, serta menunjukkan tingkat transparansi yang relatif tinggi dalam menyampaikan informasi penting mengenai kepemilikan saham publik. Sedangkan, Biaya lingkungan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mengelola biaya lingkungan tergolong baik, serta mencerminkan tingkat keterbukaan informasi yang cukup tinggi dalam menyampaikan data terkait biaya lingkungan yang bersifat penting bagi publik, dan *low carbon economy* menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mendukung upaya penurunan emisi karbon tergolong cukup tinggi.

b. Pengujian Hipotesis

Tabel 17. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Original sample (O)	T statistics	P values	Hasil
H1	KSP → LCE	-0.083	3.617	0.000	Ditolak
H2	BL → LCE	0.028	1.117	0.264	Ditolak

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0* (2025)

Pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa dua hipotesis (2) yang diajukan dua hipotesis (2) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Low Carbon Economy*

Kepemilikan saham publik berarti jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Saham ini bisa dibeli, dijual, atau diperdagangkan secara bebas oleh investor (Alifi & Kurniawati, 2024). Sebelum memutuskan untuk membeli saham, salah satu hal yang biasanya dipertimbangkan oleh investor adalah kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut (Damodaran, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai dari *Original Sample* (O) senilai -0.083 yang menunjukkan Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif. Selain itu, nilai T-Statistik > T-Tabel ($3.617 > 1.65$) dan P- Value sebesar $0.000 > 0.05$ (5%) mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistik. Dengan demikian, dari simpulan tersebut Kepemilikan Saham Publik (KSP) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Low Carbon Economy (LCE). Hal ini disebabkan oleh nilai Kepemilikan Saham Publik dari dalam penelitian ini berada pada rentang 0.000 hingga 1.641; dengan rata-rata sebesar -0.211. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam hal kepemilikan saham publik masih rendah. Artinya, kepemilikan saham publik belum mampu memberikan dorongan yang kuat terhadap upaya perusahaan dalam mendukung *Low Carbon Economy*.

Kepemilikan saham publik menunjukkan bahwa ada investor individu atau lembaga dari luar perusahaan yang ikut memiliki saham perusahaan tersebut. Umumnya, pemegang saham publik lebih mementingkan hasil keuangan jangka pendek dan ingin pengembalian investasi yang cepat. Karena itu, jika manajemen perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh pemilik saham publik, mereka cenderung mengurangi program jangka panjang yang tidak langsung menghasilkan keuntungan, termasuk langkah-langkah menuju Low Carbon Economy (LCE). Padahal, komitmen terhadap ekonomi rendah karbon biasanya memerlukan investasi besar di awal dan hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang sesuatu yang sering kali tidak sesuai dengan harapan para

pemegang saham publik. Dalam kenyataannya, menjalankan strategi rendah karbon sering kali mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini bisa mengurangi keuntungan jangka pendek dan berdampak pada berkurangnya dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Karena itu, ketika perusahaan memiliki proporsi saham publik yang tinggi, tekanan pasar untuk menjaga keuntungan bisa menghambat komitmen terhadap inisiatif rendah karbon. Temuan ini mendukung anggapan bahwa struktur kepemilikan sangat memengaruhi arah strategi perusahaan, termasuk dalam hal keberlanjutan. Salah satu penyebabnya adalah karena investor publik biasanya tidak mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari upaya menuju Low Carbon Economy (LCE), berbeda dengan pemilik jangka panjang atau lembaga investasi yang punya visi keberlanjutan. Selain itu, pemegang saham publik umumnya tidak terlalu terlibat dalam keputusan operasional perusahaan, sehingga mereka tidak banyak mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan.

Menurut teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Dalam hal ini, penerapan Strategi Low Carbon Economy dijalankan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab eksternal, khususnya terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Namun, jika kepemilikan perusahaan didominasi oleh pemegang saham publik, fokus perusahaan cenderung tertuju pada kepentingan mereka yang menginginkan keuntungan jangka pendek. Akibatnya, perhatian terhadap kepentingan stakeholder lain termasuk perlindungan lingkungan bisa menjadi berkurang. Pemegang saham publik biasanya lebih fokus pada hasil keuangan jangka pendek dan peningkatan nilai saham, dibandingkan dengan pemilik internal atau lembaga investasi yang cenderung memiliki pandangan jangka panjang terhadap keberlanjutan. Dalam perspektif teori stakeholder, dominasi satu kelompok stakeholder dalam hal ini investor publik bisa menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Akibatnya, program jangka panjang seperti pengurangan emisi karbon dan transisi ke Low Carbon Economy sering kali tidak menjadi prioritas utama. Temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan mendukung pandangan bahwa tekanan pasar dari pemegang saham publik bisa menghambat komitmen perusahaan terhadap isu lingkungan.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha beroperasi sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan pemerintah adalah dengan menerapkan praktik Low Carbon Economy, apalagi saat kesadaran publik terhadap isu perubahan iklim semakin tinggi. Namun, jika perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh pemegang saham publik, fokusnya bisa bergeser dari membangun citra baik di mata masyarakat menjadi sekadar memenuhi tuntutan pasar modal. Ketidakseimbangan ini dapat membuat perusahaan menunda atau mengurangi program-program yang mendukung tujuan jangka panjang, dan ramah lingkungan. Pertentangan antara upaya perusahaan untuk menjaga citra dan penerimaan masyarakat

melalui program keberlanjutan, dengan tekanan pasar dari pemegang saham publik, menjadi tantangan besar dalam menjalankan strategi ekonomi rendah karbon. Seringkali, keputusan untuk menjaga reputasi lingkungan seperti mengurangi emisi karbon atau berinvestasi pada energi bersih tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial. Karena itu, perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh publik sering menghadapi dilema antara mempertahankan dukungan sosial dan memenuhi tuntutan laba dari pasar. Inilah yang menjelaskan mengapa penelitian ini menemukan hubungan negatif dan signifikan antara Kepemilikan Saham Publik dan penerapan Low Carbon Economy.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi cenderung lebih lambat dalam mengadopsi praktik ramah lingkungan. Penelitian ini didukung oleh temuan Ladika dan Sautner (2019); (Amoa-Gyarteng & Dhliwayo, 2023), yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik. Sering kali berkorelasi dengan tekanan pasar terhadap kinerja keuangan jangka pendek perusahaan, namun temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Alawadi & Rashid, 2023). Penelitian Ladika dan Sautner (2019), menemukan bahwa investor publik terutama yang bersifat transaksional, cenderung mendorong manajemen untuk fokus pada pencapaian laba jangka pendek dibandingkan strategi jangka panjang. Penelitian oleh (Alawadi & Rashid, 2023), mengungkapkan bahwa praktik manajemen laba berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi perusahaan publik non-keuangan, sebaliknya penggunaan utang jangka pendek terbukti berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. Meskipun kepemilikan publik tidak selalu berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, faktor lain seperti struktur modal dan penggunaan utang jangka pendek dapat memainkan peran penting dalam menentukan fokus perusahaan pada laba jangka pendek atau strategi jangka panjang (Amoa-Gyarteng & Dhliwayo, 2023).

Dalam konteks ini, inisiatif rendah karbon yang membutuhkan investasi besar dan waktu implementasi yang lama, menjadi kurang menarik bagi perusahaan yang berada di bawah pengaruh kuat pemegang saham publik. Hal ini menjadi salah satu penjelasan mengapa KSP dapat memberikan pengaruh negatif terhadap upaya perusahaan dalam mendukung Low Carbon Economy. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Gillan dan Starks (2000), menunjukkan bahwa investor publik biasanya kurang aktif dalam mendukung agenda Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebaliknya, investor institusional atau strategis cenderung lebih terlibat dan vokal dalam mendorong pentingnya keberlanjutan. Investor publik sering kali lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak sosial atau lingkungan (Kouam, 2024). Sementara itu, investor institusional lebih terdorong untuk memasukkan pertimbangan ESG karena mereka percaya bahwa hal ini berhubungan erat dengan kinerja keuangan yang baik. Mereka juga lebih tanggap terhadap permintaan klien akan investasi berkelanjutan dan aktif memengaruhi arah kebijakan perusahaan dengan cara berinteraksi langsung dengan manajemen (Rau & Yu, 2024). Karena hal ini, perusahaan cenderung mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan investor publik, termasuk mengurangi pengeluaran untuk

proyek lingkungan yang tidak langsung menghasilkan keuntungan.

Penelitian terdahulu oleh Zhang et al (2017), menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan publik yang tinggi cenderung memiliki kinerja lingkungan yang lebih rendah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pasar saham memberikan insentif yang lemah terhadap praktik keberlanjutan, yang menyebabkan perusahaan tidak terdorong untuk berinvestasi dalam teknologi hijau atau memperbaiki jejak karbon mereka. Menurut penelitian (Luo et al., 2024), mengungkapkan bahwa kepemilikan saham oleh dana indeks (index funds) yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan peminjaman kembali saham untuk pemungutan suara (proxy voting). Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional yang memiliki saham publik dapat mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam hal kompensasi dan pemilihan direksi, yang sering kali berfokus pada hasil jangka pendek (Nasta et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, di mana KSP ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Low Carbon Economy. Hasil ini memperkuat literatur bahwa kepemilikan publik dapat menjadi hambatan terhadap transformasi bisnis menuju praktik ramah lingkungan. Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, tekanan terhadap kinerja keuangan jangka pendek dari investor publik bahkan lebih besar akibat ketidakstabilan ekonomi dan pergerakan pasar saham yang tidak menentu.

Penelitian lokal seperti oleh Santoso dan Laksmi (2020), juga menemukan bahwa perusahaan publik cenderung enggan berinvestasi dalam Inisiatif Hijau karena dianggap kurang menguntungkan dalam waktu dekat. Dalam penelitian yang disebutkan (Hasselsteen et al., 2024), bahwa tantangan dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia termasuk kurangnya insentif bagi perusahaan, biaya pungutan untuk green bond yang dianggap tidak signifikan, dan sertifikasi green yang tidak mudah. Selanjutnya penelitian oleh (Rahmani et al., 2024), mengidentifikasi tantangan utama dalam adopsi green finance di Indonesia, termasuk kurangnya kesadaran dan edukasi terkait instrumen keuangan hijau, serta hambatan regulasi dan keterbatasan insentif. Biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan fasilitas yang didapatkan, sehingga perusahaan mungkin enggan berinvestasi dalam inisiatif hijau. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini tidak hanya konsisten dengan penelitian terdahulu secara global, tetapi juga mencerminkan tantangan mendasar yang dihadapi perusahaan ditingkat lokal dalam menyeimbangkan tuntutan pasar dengan komitmen terhadap Low Carbon Economy.

Dampak dari penelitian ini sangat penting bagi manajer perusahaan dan pembuat kebijakan. Bagi manajemen, diperlukan strategi komunikasi dan pelibatan pemegang saham publik untuk menyadarkan pentingnya transisi menuju Low Carbon Economy dalam jangka panjang. Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, pemerintah dapat mendorong insentif kebijakan perpajakan atau kebijakan pengungkapan keberlanjutan yang lebih ketat agar perusahaan tetap terdorong mengimplementasikan inisiatif hijau meskipun berada di bawah tekanan pasar saham. Dengan demikian, perusahaan dapat menyeimbangkan antara tuntutan profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan secara lebih strategis.

Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*

Pengeluaran untuk biaya lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan menghadapi isu-isu lingkungan (Syamsuddin, 2025). Biaya lingkungan adalah beban finansial yang harus ditanggung perusahaan sebagai hasil dari pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional sehari-hari serta upaya perlindungan lingkungan yang akan dilakukan (Judijanto et al., 2025). Pernyataan serupa disampaikan oleh (Aftab et al., 2024), yang menyatakan bahwa biaya lingkungan merupakan pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan program pemulihan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan nilai Original Sample (O) sebesar +0.028, yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan T-Statistik > T-Tabel ($1.117 > 1.65$) dan P-Value ($0.264 > 0.05$ (5%)) sehingga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian, Biaya Lingkungan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE).

Teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak berkepentingan (stakeholders), seperti masyarakat, karyawan, pemerintah, dan lingkungan. Dalam teori ini, adopsi Low Carbon Economy (LCE) merupakan wujud komitmen perusahaan dalam merespon tuntutan yang semakin tinggi dari pemangku kepentingan eksternal terhadap bisnis berkelanjutan. Namun, jika perusahaan didominasi oleh kepemilikan saham publik, maka orientasi pengambilan keputusan sering kali lebih condong ke pemenuhan ekspektasi investor jangka pendek. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan mengesampingkan kepentingan stakeholders yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Biaya Lingkungan cenderung menimbulkan tekanan agar perusahaan terus meningkatkan nilai saham dan laba dalam waktu singkat. Dalam teori stakeholder, dominasi kepentingan satu kelompok (yakni investor publik) atas kelompok lain dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Sebagai akibatnya, inisiatif strategis jangka panjang seperti investasi dalam teknologi rendah karbon atau pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi kurang prioritas. Oleh karena itu, teori stakeholder menjelaskan bahwa struktur biaya yang terlalu terfokus pada pasar saham dapat menghambat komitmen perusahaan terhadap tujuan lingkungan jangka panjang.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi dalam kerangka nilai dan norma yang diterima masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Dalam konteks keberlanjutan, legitimasi diperoleh melalui komitmen terhadap lingkungan dan kontribusi terhadap agenda global seperti transisi ke ekonomi rendah karbon. Namun, jika perusahaan lebih berorientasi pada biaya lingkungan, maka usaha untuk membangun legitimasi ini bisa dikompromikan. Keputusan strategis yang terlalu fokus pada laba jangka pendek dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat dan stakeholder lain, sehingga mengancam legitimasi perusahaan. Perusahaan yang terlalu terpengaruh oleh dinamika pasar saham mungkin akan mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan karena tidak

dianggap menguntungkan secara langsung. Dalam perspektif teori legitimasi, hal ini berisiko merusak kepercayaan publik dan menghambat integrasi nilai-nilai lingkungan dalam strategi bisnis. Oleh karena itu, agar perusahaan tetap relevan secara sosial dan sah secara moral, mereka perlu menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan tuntutan lingkungan dan sosial dari masyarakat luas.

Temuan hubungan negatif yang signifikan antara biaya lingkungan dan Low Carbon Economy mengindikasikan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi sosial. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Bushee (1998); (Akter et al., 2024); (Banerjee et al., 2024), telah menunjukkan bahwa biaya lingkungan cenderung membuat perusahaan lebih fokus pada pencapaian target keuangan jangka pendek. Bushee (1998) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa investor publik yang bersifat transaksional cenderung menekan manajemen untuk meningkatkan laba dalam waktu singkat. Penelitian dari (Akter et al., 2024), mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa investor dengan kepemilikan besar dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam hal manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan laba melalui manipulasi aktivitas riil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja saham perusahaan (Banerjee et al., 2024). Akibatnya, perusahaan yang didominasi oleh pemegang saham publik sering kali enggan mengalokasikan sumber daya untuk investasi jangka panjang yang tidak memberikan imbal hasil instan, seperti pengembangan inisiatif ramah lingkungan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa biaya lingkungan dapat menghambat implementasi Low Carbon Economy.

Dyck et al. (2019) juga menemukan bahwa biaya lingkungan cenderung kurang terlibat dalam isu-isu keberlanjutan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dibandingkan dengan pemegang saham institusional atau strategis, investor publik biasanya tidak memiliki insentif jangka panjang untuk mendorong perusahaan agar berkontribusi terhadap agenda lingkungan. Penelitian oleh (Kim, 2024), menemukan bahwa biaya institusional oleh pemerintah dan dana pensiun memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ESG perusahaan. Investor ini cenderung memiliki perspektif jangka panjang dan dipengaruhi oleh tekanan publik serta regulasi pemerintah, yang mendorong mereka untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. (Makhija et al., 2025), membedakan dampak antara investor sosial dan investor tradisional terhadap kinerja ESG perusahaan. Investor sosial, yang memprioritaskan nilai-nilai etika, cenderung memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan dibandingkan dengan investor tradisional. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih terbuka terhadap publik melalui pasar saham sering kali mengalami tekanan untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan, yang berpotensi bertentangan dengan upaya menuju ekonomi rendah karbon.

Studi yang dilakukan oleh Zhang, Zhu, dan Ding (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur biaya tersebar di pasar modal cenderung memiliki skor kinerja lingkungan yang lebih rendah. Hasilnya

menunjukkan bahwa biaya institusional dan kepemilikan negara memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan karbon sukarela perusahaan. Sebaliknya, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tersebut (Choi et al., 2024). Penelitian oleh (Hou et al., 2024), menemukan bahwa biaya lingkungan dengan orientasi jangka panjang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja ESG perusahaan. Sebaliknya, biaya lingkungan dengan orientasi jangka pendek menunjukkan dampak negatif. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris lainnya yang menyatakan bahwa tekanan dari pasar modal lebih banyak mendorong efisiensi biaya dan profitabilitas dibandingkan dengan inovasi hijau atau pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara BL dan LCE sejalan dengan tren yang telah diamati dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan dalam konteks negara berkembang juga memperkuat temuan ini.

Dalam studi oleh Santoso dan Laksmi (2020), ditemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia cenderung minim dalam menerapkan praktik keberlanjutan karena tingginya tekanan dari investor yang berorientasi pada keuntungan finansial. (Ray & Hardi, 2024), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka cenderung mengalami peningkatan kinerja jangka panjang. Meskipun terdapat tekanan untuk fokus pada keuntungan finansial, perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. (Mechrgui & Theiri, 2024), mengungkapkan bahwa investor yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan dapat mempengaruhi perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Meskipun tekanan untuk mencapai keuntungan finansial tetap ada, investor yang mendukung praktik keberlanjutan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan di negara berkembang biasanya lebih rentan terhadap ketidakstabilan pasar dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan biaya yang tidak memberikan hasil langsung.

Hal ini menjelaskan mengapa dalam konteks lokal seperti Indonesia, biaya lingkungan bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Low Carbon Economy secara efektif. Penelitian ini penting bagi pengambil kebijakan dan manajer perusahaan karena menunjukkan bahwa elemen tertentu dalam struktur perusahaan (seperti pola kepemilikan atau struktur biaya) dapat menjadi penghambat dalam upaya transisi ke arah keberlanjutan. Oleh karena itu, strategi perusahaan perlu dievaluasi kembali untuk menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah dan lembaga pengatur pasar modal juga dapat mengambil peran dengan menciptakan insentif atau kebijakan tata kelola yang mendorong perusahaan tetap memperhatikan aspek lingkungan, meskipun berada dalam tekanan pasar yang berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepemilikan Saham Publik berdampak pada seberapa banyak perusahaan mengungkapkan informasi tentang *Low Carbon Economy*. Pengaruhnya bersifat negatif dan signifikan, artinya semakin besar Kepemilikan Saham Publik (KSP), semakin rendah tingkat pengungkapan perusahaan terkait upaya menuju *Low Carbon Economy* (LCE).

Biaya Lingkungan (BL) berpengaruh terhadap seberapa banyak perusahaan mengungkapkan informasi tentang *Low Carbon Economy* (LCE). Namun, pengaruhnya bersifat negatif dan tidak signifikan. Artinya, besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk lingkungan tidak menjadi faktor utama atau penentu dalam mendukung upaya menuju *Low Carbon Economy*.

Saran

Meningkatkan peran pemegang saham publik dalam mendorong keterbukaan lingkungan karena Kepemilikan Saham Publik terbukti memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan informasi tentang *Low Carbon Economy*, perusahaan perlu menyadarkan dan mengedukasi para pemegang saham publik tentang pentingnya keterbukaan informasi lingkungan dan keberlanjutan. Upaya ini bisa dilakukan melalui laporan tahunan, pertemuan pemegang saham, dan publikasi mengenai kebijakan keberlanjutan perusahaan.

Mengoptimalkan Biaya Lingkungan Lewat Program Inisiatif Hijau, meskipun Biaya Lingkungan tidak langsung berpengaruh besar terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*, dampaknya menjadi positif dan signifikan jika disalurkan melalui program Inisiatif Hijau. Karena itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan anggaran lingkungan secara lebih tepat, misalnya dengan menjalankan program nyata seperti penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Abid, N., Ceci, F., & Aftab, J. (2024). Attaining sustainable business performance under resource constraints: Insights from an emerging economy. *Sustainable Development*, 32(3), 2031–2048.

Aftab, J., Abid, N., Sarwar, H., Amin, A., Abedini, M., & Veneziani, M. (2024). Does corporate social responsibility drive financial performance? Exploring the significance of green innovation, green dynamic capabilities, and perceived environmental volatility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1634–1653.

Al Sayed, J., & Sayed, M. (2024). *The impact of digital technologies on international business practices*.

Ali, W., Wilson, J., & Frynas, J. G. (2024). Corporate governance mechanisms and carbon disclosure: A multilevel and multitheory literature survey. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.

Alifi, A., & Kurniawati, L. (2024). The Influence of Earning Management, Dividend Policy, and Free Float Ratio on Stock Returns. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 128–143.

Alshukri, T., Seun Ojekemi, O., Öz, T., & Alzubi, A. (2024). The Interplay of Corporate Social Responsibility, Innovation Capability, Organizational Learning, and Sustainable Value Creation: Does Stakeholder

Engagement Matter? *Sustainability*, 16(13), 5511.

Barney, J. B., & Harrison, J. S. (2020). Stakeholder theory at the crossroads. In *Business & Society* (Vol. 59, Issue 2, pp. 203–212). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.

Can, O., & Turker, D. (2024). Institutional pressures and greenwashing in social responsibility: reversing the link with hybridization capability. *Management Decision*.

Dagestani, A. A., Chen, P., Du, L., Hu, J., & Bilan, Y. (2024). The impacts of urban development orientation of resource-based cities on environmental information disclosure and greenwashing behavior of listed firms in China. *Environment, Development and Sustainability*, 1–26.

Damayanti, N. D. (2024). Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor. *Neraca Manajemen, Ekonomi Vol*, 3(9).

Damodaran, A. (2024). *The little book of valuation: How to value a company, pick a stock, and profit*. John Wiley & Sons.

Dhayal, K. S., Agrawal, S., Agrawal, R., Kumar, A., & Giri, A. K. (2024). Green energy innovation initiatives for environmental sustainability: current state and future research directions. *Environmental Science and Pollution Research*, 1–19.

Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.

Difinubun, Y., & Nastiti, D. D. (2024). Global Research on ESG in Accounting Science: Bibliometrics analysis. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 18–27.

Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770.

Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231.

Ghazali, A., & Z. (2020). (n.d.). *Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance (ESG) terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indoneisa. Prosiding SNAM PNJ*, 1–13.

Handayani, M. K. Y. (2019). The effect of ESG performance on economic performance in the high profile industry in Indonesia. *J Int Bus Econ*, 7, 112–121.

Husada, E. V., & Handayani, S. (2021). Pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 122–144.

Judijanto, L., Respati, R. D., Kartini, R. A., & Difinubun, Y. (2025). Bibliometric Analysis on Ecotourism and Cultural Tourism Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(03), 567–579. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i03.1784>

Kujala, J., Lämsä, A.-M., & Riivari, E. (2017). Company stakeholder responsibility: An empirical investigation of top managers' attitudinal change. *Baltic Journal of Management*, 12(2), 114–138.

Lamberton, G. (2015). Accounting and happiness. *Critical Perspectives on Accounting*, 29, 16–30.

Lindsey, K., Mauck, N., & Olsen, B. (2021). The coming wave of small

business succession and the role of stakeholder synergy theory. *Global Finance Journal*, 48, 100457.

MacLeod, A. J. (2024). Why Equity Follows the Law. *Laws*, 13(1), 3.

Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder or legitimacy theory? The rationale behind a company's materiality analysis: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7763.

Mulpiani, W. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 77–90.

Nanik Ermawati dan Yanuar Nugroho, N. S. (2023). (n.d.). *PELAPORAN ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE (ESG) DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT JAWA BERDIMENSI "HAMEMAYU HAYUNING BAWANA."* วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสต์เอเชีย, 4(1), 88–100.

Pradhani, T. B. W., Shabana, M. A., & Pandin, M. Y. R. (2024). The impact of improving environmental performance and implementing environmental cost allocation on company profitability. *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 1069–1080.

Qian, W., Parker, L., & Zhu, J. (2024). Corporate environmental reporting in the China context: The interplay of stakeholder salience, socialist ideology and state power. *The British Accounting Review*, 56(1), 101198.

Reid, A., Ringel, E., & Pendleton, S. M. (2024). Transparency reports as CSR reports: motives, stakeholders, and strategies. *Social Responsibility Journal*, 20(1), 81–107.

Ren, F. (2024). Does Government Environmental Concern Affect Enterprise Sustainable Development? Evidence from China. *Sustainability*, 16(21), 9527.

Saeed, U. F., Kamil, R., & Wiredu, I. (2024). The moderating role of technological innovation on ownership structure, financing decisions and environmental accounting disclosure. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2396543.

Sugiarto, A. (2018). *Manajemen kearsipan modern*.

Sugiyono. (2017). (n.d.). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sujatmiko, D. B., Difinubun, Y., & Munzir, M. (2024). Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia diproses dengan Profitabilitas. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 69–79.

Syamsuddin, F. R. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. *Jurnal Economic Resource*, 8(1), 432–438. <https://doi.org/10.57178/jer.v8i1.1428>

Talan, G., Sharma, G. D., Pereira, V., & Muschert, G. W. (2024). From ESG to holistic value addition: Rethinking sustainable investment from the lens of stakeholder theory. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103530.

Tracy, T. C. (2024). *How to read a financial report: wringing vital signs out of the numbers*. John Wiley & Sons.

Uswatul, F. N., Difinubun, Y., & Khaerani, A. (2024). *Akuntansi Keberlanjutan : Pengungkapan Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (ESG), Ekonomi Rendah Karbon dan Informasi Akuntansi Hijau*. 2(1), 34–45.

Vazhynskyi, V., Pohoretskyi, M., & Toporetska, Z. (2024). Responsible

Business Practice By Institutional Investors As The Basic Means Of Preventing Violations Of Public Interest Of Citizen Investors. *Baltic Journal of Economic Studies*, 10(1), 20–29.

Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.